

Perkembangan mode busana pengantin dalam upacara perkawinan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 1877-1988 = The development of mode of the costume bride in marriage ceremony of the Ngayogyakarta Hadiningrat Kraton 1877-1988

Siregar, Jenny Sista, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477728&lokasi=lokal>

Abstrak

Upacara perkawinan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kraton Yogyakarta menjadi tradisi pada masa Hamengkubuwana VII dan VIII. Busana pengantin menjadi salah satu alat meningkatkan kewibawaan sultan di Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta merupakan daerah swapradja pada masa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sehingga pemakaian busana pengantin mengikuti aturan Staatsblad dan Rijksblad. Gaya busana kalangan bangsawan di Kraton Yogyakarta terikat pada aturan Kraton Yogyakarta sebagai Pusat. Berbeda dengan masa Hamengkubuwana IX, keterikatan pada Pusat sudah tidak terjadi oleh karena Kraton Yogyakarta menjadi bagian dari propinsi Negara Republik Indonesia. Secara resmi, Hamengkubuwana IX mengizinkan busana pengantin dalam upacara perkawinan Kraton Yogyakarta dipraktekkan masyarakat di segala lapisan tanpa mengikuti aturan ketat seperti di Kraton Yogyakarta. Disertasi ini menggunakan pendekatan struktural. Tujuan disertasi adalah memahami perkembangan masyarakat dan busana pengantin Kraton Yogyakarta dan nilai-nilai budaya dalam upacara perkawinan Kraton Yogyakarta.

Marriage ceremony of the Ngayogyakarta Hadiningrat Kraton Yogyakarta Kraton became a tradition during the Hamengkubuwana VII and VIII. The costume bride to be one of the tools increase the authority of the Sultan in the Yogyakarta Kraton. The Yogyakarta Kraton is an area swapradja during the reign of the Dutch East Indies so that the use of a costume bride to follow the rules in Staatsblad and Rijksblad Statute. Fashion style nobility in the Yogyakarta Kraton bound by the rules as a Center. In contrast to past Hamengkubuwana IX, attachment to the Centre has not happened because of the Yogyakarta Kraton become part of the province of the Republic of Indonesia. Officially, Hamengkubuwana IX allows the costume bride in the marriage ceremony the Yogyakarta Kraton practiced at all levels of society without following the strict rules such as the Yogyakarta Kraton. This dissertation uses structural approach. Dissertation goal is to understand the development of society and the costume bride of the Yogyakarta Kraton and cultural values in marriage ceremony of the Yogyakarta Kraton.